

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya akan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 angka 19, penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Pertambangan dilakukan berdasarkan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Peraturan perundang-undangan itu disebut hukum pertambangan. Setiap daerah memiliki potensinya masing-masing, termasuk kabupaten Mojokerto yang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi pertambangan batuan yang cukup besar dengan kualitas yang baik, namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kabupaten Mojokerto adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Lamongan di utara, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan di timur, Kabupaten Malang dan Kota Batu di selatan, serta Kabupaten Jombang di barat. Kabupaten Mojokerto terdiri atas

18 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Kini banyak gedung dan kantor pemerintahan yang dipindahkan ke Kota Mojosari, sebelah timur kota Mojokerto.<sup>1</sup>

Permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Mojokerto yaitu ketika penambangan yang dilakukan adalah penambangan yang tanpa izin ataupun dengan izin “menyuap” kepada pejabat terkait. Para penambang tradisional (liar) ini tidak mudah untuk diatur dan diarahkan. Misalnya mereka melakukan penambangan di setiap bagian sungai dengan kapasitas besar yang melebihi batas-batas yang ada dalam Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan tanpa izin ini bagai jamur yang tumbuh subur di musim hujan, keberadaannya hampir menyebar di seluruh kecamatan di kabupaten Mojokerto seperti, kecamatan Ngoro, Pacet, Gondang, Dlanggu, Bangsal, Dawar Blandong dan Puri.

Di Kabupaten Mojokerto kita dapat menyaksikan dampak dari pertambangan tanpa izin yaitu dengan timbulnya tanah longsor, amblas, banjir, tanah tidak subur lagi, sungai menjadi kering sehingga akan menimbulkan kerugian rakyat, bangsa dan negara. Di sinilah penegakan hukum harus ditegakkan terhadap penambangan batuan tanpa izin ini atau tindak pidana tanpa izin (*illegal mining*). Ini wajib dilakukan demi keadilan sosial karena tidak menutup kemungkinan apabila terus-menerus ada penambang liar tanpa izin maka akan berdampak buruk bagi warga sekitar.

---

<sup>1</sup> Kabupaten Mojokerto. <http://id.wikipedia.org/>. Diakses tanggal 7 Juni 2014

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 158 sudah jelas mengatakan “Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)”. Tetapi seakan tidak berlaku peraturan yang sudah jelas tertuang dalam undang-undang itu manakala masih banyaknya penambang-penambang liar yang melakukan pertambangan tanpa ada izin resmi dari badan terkait melakukan usaha penambangan di daerah Kabupaten Mojokerto, disinilah peran penyidik kepolisian terutama penyidik kepolisian Resort Mojokerto untuk menangani tindak pidana tanpa izin (illegal mining) agar menerapkan peraturan dengan tegas karena sudah jelas diatur dalam undang-undang agar tidak merugikan masyarakat dan lama-kelamaan pasti akan merugikan masyarakat sekitar.

Dari penelitian awal yang dilakukan oleh penulis baik melalui melihat kejadian di lapangan dan memperoleh informasi terkait penambangan ilegal di Kabupaten Mojokerto melalui internet dan media sosial peneliti melihat cukup banyak kasus yang terjadi mengenai penambangan liar di Kabupaten Mojokerto. Seperti contohnya yang terbaru tertanggal 5 Februari 2016 :

“Diduga tak mengantongi ijin, lokasi galian C milik Aminun bin satuwi di dusun pandisari Rt 01 Rw 08 desa sawo kecamatan kutorejo, Kabupaten Mojokerto, ditutup. Penutupan dilakukan saat Kapolres Mojokerto AKBP Muji Ediyanto melakukan sidak ke galian C. Bahkan, Sat Reskrim Polres Mojokerto sudah menerbitkan laporan polisi (LP) nomor 44/II/2016/JATIM/RESMJK tertanggal Sabtu 5 Februari 2016. Dari LP tersebut tertulis jika penertiban dilakukan karena usaha penambangan batuan tersebut diketahui tak memiliki dokumen perijinan yang sah dan Aminun sebagai terlapor. Kasat Reskrim

Polres Mojokerto AKP Budi Santoso, SH mengatakan, pihaknya mengeluarkan LP karena usaha penambangan batuan tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin. "Lokasi galian C tersebut milik Aminun warga Dusun pandisari kecamatan kutorejo kabupaten Mojokerto. Masih kata Kasat, informasi yang didapat dari masyarakat jika usaha penambangan itu tanpa dilengkapi dengan ijin. Setelah dilakukan pengecekan diketakui jika informasi tersebut benar sehingga pihaknya melakukan penutupan lokasi galian C tersebut.<sup>2</sup>

Maka Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penulisan hukum (skripsi) ini menggunakan judul **“PENYIDIKAN TERHADAP PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA OLEH PENYIDIK PEJABAT POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi di Kepolisian Resort Mojokerto).**

#### **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimana Tindakan Penyidik Berkaitan Dengan Penambangan Batuan Tanpa Izin Usaha Di Kepolisian Resort Mojokerto?
2. Apa Hambatan Penyidik Dalam Menangani Kasus Penambangan Batuan Tanpa Izin Usaha Di Kepolisian Resort Mojokerto?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dilakukannya satu penelitian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, begitu pula dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran se jelasnya tentang tindakan penyidik berkaitan dengan penambangan batuan tanpa izin usaha di Kepolisian Resort Mojokerto.

---

<sup>2</sup> Kanit tipiter Iptu SUKACA, SH.

2. Untuk mengetahui gambaran selengkapnya hambatan penyidik dalam menangani kasus penambangan batuan tanpa izin usaha di Kepolisian Resort Mojokerto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini adalah :

##### **a. Bagi Penulis**

Dengan penelitian ini diharapkan nantinya akan menjadi pengetahuan baru guna menambah wawasan terhadap permasalahan yang diangkat dan juga sebagai prasyarat akademis untuk mendapat gelar kesarjanaan (S1) dalam bidang ilmu hukum.

##### **b. Bagi Masyarakat**

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami permasalahan yang diangkat yaitu mengenai penyidikan terhadap subyek hukum yang melakukan tindak pidana penambangan batuan tanpa izin oleh Kepolisian Resort Mojokerto.

##### **c. Bagi Penegak Hukum**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan satu peraturan perundang-undangan dengan baik sehingga dapat meminimalisir kesalahan agar dapat tercapainya Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Asas Kepastian Hukum.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resort Mojokerto dalam rangka melakukan proses

penyidikan terhadap penambangan batuan tanpa izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

2. Memberikan wawasan bagi penambang-penambang batuan liar tanpa izin usaha bahwa dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah jelas disebutkan bahwa penambangan harus ada izin usaha pertambangan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih menitik beratkan kepada studi terhadap fenomena hukum yang telah terjadi di masyarakat. Uraian serta masalah akan ditelusuri dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis yaitu pendekatan dari aspek hukum positif. Hukum positif yakni pendekatan kepada Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan sosiologis merupakan pendekatan dengan melihat kejadian atau kenyataan pada masyarakat.<sup>3</sup> Kejadian atau kenyataan pada masyarakat dalam penelitian ini yaitu mengenai penyidikan oleh penyidik pejabat polisi republik Indonesia di Kepolisian Resort Mojokerto.

Maka pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada aturan hukum (*Das Sollen*) dan dipadukan dengan menelaah

---

<sup>3</sup> Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologis dan Metode Penelitian Hukum. Malang. UMM Press. Hal. 103

fakta-fakta sosial (*Das Sein*) yang terkait dalam penelitian.<sup>4</sup> Penelitian yang dimaksudkan adalah penelitian Kejadian atau kenyataan pada masyarakat dalam penelitian ini yaitu mengenai penyidikan oleh penyidik pejabat polisi republik Indonesia di Kepolisian Resort Mojokerto.

## 2. Lokasi penelitian :

Lokasi penelitian adalah kantor Kepolisian Resort Mojokerto dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Resort Mojokerto banyak data yang dibutuhkan penulis mengenai penyidikan terhadap penambangan batuan tanpa izin di kabupaten Mojokerto.

## 3. Jenis dan Sumber data :

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu Kepolisian Resort Mojokerto yang terletak di Jalan Gajah Mada No.99 Mojosari Kabupaten Mojokerto, penelitian dilakukan dengan cara wawancara kepada responden untuk menanyakan pendapat ataupun persepsi dari responden pelaku untuk keperluan hasil penelitian berupa wawancara, studi dokumen serta peraturan perundang-undangan, seperti KUHAP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang diteliti oleh penulis.

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 17

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen - dokumen resmi, buku - buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan terkait. Antara lain :

1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945

2) UU. No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, jurnal hukum, kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. Penulis menggunakan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis ini menggunakan teknik pengumpulan data penelitian yakni sebagai berikut. :

- a. Wawancara adalah suatu proses/cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab, dialog atau diskusi tentang tindakan penyidik berkaitan dengan penambangan batuan tanpa izin usaha dan hambatan penyidik dalam menangani kasus penambangan batuan tanpa izin. Wawancara ini dilakukan dengan bapak IPTU Sukaca, SH, yang mana merupakan Kanit TIPITER Kepolisian Resort Mojokerto yang dianggap mengetahui banyak hal mengenai penambangan batuan tanpa izin usaha yang ada di Kabupaten Mojokerto.



- b. Observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) penyitaan barang bukti dan menemukan atau menetapkan tersangka.
- c. Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data ini diambil dari buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai tambahan dalam penulisan, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Yaitu buku tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta KUHAP.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan data penelitian baik wawancara, dokumentasi, maupun penelusuran internet telah dirasa cukup, maka penulis menggunakan metode Deskriptif Analitis yaitu mendeskripsikan dengan cara menggambarkan kejadian kemudian dianalisis menggunakan Deskriptif Kualitatif.<sup>5</sup> Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan

---

<sup>5</sup> Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, UMM. Hal. 19

wawancara secara mendalam.<sup>6</sup> Kemudian mendasarkan pada teori yang ada dalam peraturan perundang-undangan lalu penulis dapat menarik kesimpulan dan dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan.

## **G. Rencana Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA/TEORI**

Tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dan skripsi ini yang meliputi tinjauan umum penyidikan, pengertian penambangan, penyidik, subyek hukum.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis menguraikan dan membahas mengenai tindakan penyidik berkaitan dengan penambangan batuan tanpa izin usaha di Kepolisian Resort Mojokerto dan hambatan penyidik dalam menangani kasus penambangan batuan tanpa izin usaha di Kepolisian Resort Mojokerto.

### **BAB IV PENUTUP**

Kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan dari hasil penelitian diatas.

---

<sup>6</sup> <http://aldoranuary26.blog.fisip.uns.ac.id/2012/02/29/deskriptif-kualitatif/>, diakses pada tanggal 7 Juni 2014